

**” PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KENDALA – KENDALA YANG
DIHADAPI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN”**

SKRIPSI

*Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi*



Oleh :

Sherly Fardila
2003/44832

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

2008

ABSTRAK

Sherly Fardila, 2003 / 44832 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala – Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pembimbing

: 1. Dra.Mirna Tanjung,MS

2. Deviani, SE,Ak

Penelitian ini melihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala - kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan. Perumusan Masalahnya adalah (1) Sejauh mana Pemko Padang mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dan (2) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kota Padang.(2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas – dinas yang ada di Kota Padang dan Bendahara Umum Daerah dengan metode pengambilan sampel *Random Sampling* dan sampel yang diambil sebanyak 7 Dinas dan Satu Bendahara Umum Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah serta data sekunder berupa Laporan Keuangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP dengan banyaknya Dinas yang belum selesai dalam menyusun Laporan Keuangan (2) Adanya kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi, kurangnya pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang.

Dari Penelitian ini penulis sarankan kepada Pemko Padang agar memberikan rentang waktu antara sosialisasi dengan penerapan, melakukan pelatihan – pelatihan lebih banyak lagi mengenai penerapan SAP dengan perwakilan tiap dinas lebih dari satu orang dan memberikan beasiswa pendidikan sesuai dengan jurusan tempat ia bekerja.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim, puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan Keuangan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Keberhasilan penulisan skripsi ini berkat usaha keras penulis serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan tulus penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Mirna Tanjung, M.S dan Ibu Deviani,SE,Ak sebagai pembimbing I dan II yang penuh dengan ketulusan dan kesabaran serta kesediannya meluangkan waktu di tengah – tengah kesibukan beliau, untuk membimbing dan memberi arahan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Ibu Lili Anita, SE,Ak.Msi, Bapak Dr.Efrizal Sofyan,SE,AK,M.Si, dan Bapak Syamwil,M.Pd selaku narasumber (dosen penguji) yang telah memberikan sumbangan pemikiran berupa masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Pimpinan dan Staff Prodi Akuntansi yang telah memberi berbagai kemudahan demi kelancaran studi penulis dalam perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.

4. Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberi berbagai kemudahan demi kelancaran studi penulis dalam perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing penulis selama perkuliahan, serta segenap karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
6. Kepala Bagian Keuangan pada Dinas –dinas yang diteliti dan pada pemko Padang yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan pengumpulan data, serta para karyawan khususnya bendahara pengeluaran dan penerimaan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan peneliti, serta penghargaan khusus penulis buat Pak Syukral (Dinas Pariwisata & Kebudya Kot Pdg), Kak ANi (DISperindag Kota Pdg) dan Pak Ardi serta Rekan (Dinas Pendidikan Kota Pdg).
7. Rekan – rekan mahasiswa angkatan 2002, 2003, 2004 & 2005, khususnya Nanda, Tia, Shera, Anes, Eko, Bhocay, Koko, Rico, Rino, Irwan, Arpan, Aan, Aldi, Diah, Taufik, Yayang , Neni, Ita, Yayut, Bang Ardi dan Widya yang terasa sekali bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih tak terhingga buat kedua orangtua tercinta (Papa dan Ibu), Mama dan Ayah Pondok Kopi, Mama dan Ayah Bekasi, UMI dan Ayah Tando, Da Yan, Ni Meri dan Ni Oza, Ni Mira & Da Adi, Iyang dan Daos atas do'a, dorongan dan segala bentuk ketulusannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1 ini.

Semoga Allah membalas segala bentuk bantuan diatas dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

Padang, July 2008

Penulis,

Sherly Fardila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	
1. Standar Akuntansi Pemerintah.....	7
2. Laporan Keuangan.....	8
3. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	22
4. Asumsi Dasar.....	23
5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	24

6. Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
7. Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	30
8. Teori Kendala (The Theory of Constraints) atau TOC.....	33
9. Pengertian Sumber Daya Manusia.....	38
10. Pengertian Pelatihan.....	38
11. Pengertian Bendahara	39
B. Kerangka Konseptual.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisa Data.....	46
G. Definisi Operasional.....	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Pemko	48
B. Temuan	60
C. Pembahasan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Format Laporan Realisasi Anggaran.....	13
2. Format Neraca.....	15
3. Format Laporan Arus Kas.....	17
4. Siklus Akuntansi SKPD.....	31
5. Siklus Akuntansi SKPKD.....	32
6. Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah.....	33
7. Nama dan Alamat Dinas-dinas Kota Padang.....	43
8. Nama dan Alamat Sampel Dinas-dinas Kota Padang.....	45
9. BJTM.....	52
10. Jurnal Penyetoran Kas di BUD.....	52
11. BJTK.....	53
12. Jurnal Penyetoran Kas di BUD.....	53
13. Jurnal Umum.....	54
14. Jurnal Pembuka.....	55
15. BJKK.....	56
16. Jurnal Pengeluaran Kas di BUD.....	56
17. BJKM.....	57
18. Jurnal Pengeluaran Kas di BUD.....	57
19. BJLS.....	58
20. Jurnal Pembuka dan Jurnal Balik.....	59
21. Laporan Realisasi Anggaran.....	66
22. Neraca.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	42
2. Aliran Laporan Keuangan Pemko Padang	50
3. Siklus Akuntansi Penerimaan	51
4. Siklus Akuntansi Pengeluaran.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1. Jurnal Pembuka.....	87
2. Surat Tanda Setoran.....	88
3. Surat Perintah Pencairan Dana.....	89
4. Buku Besar.....	90
5. Buku Jurnal Umum.....	91
6. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	92
7. Kode Akun Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan sistem akuntansi pada Pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, masih menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Pada sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, dimana pada transaksi ekonomi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan aktiva tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga selama ini pemerintah kita tidak pernah menampilkan laporan realisasi anggaran sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum kita kenal guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas, pada basis ini hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat dan daerah terutama dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menyebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Walaupun telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun pemerintah baik pusat maupun daerah belum bisa menyusun laporan keuangan dimaksud. Hal ini disebabkan belum tersedianya standar yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan tersebut pada saat itu.

Standar Akuntansi Pemerintahan ini dinilai *urgent* dan harus dilaksanakan sesegera mungkin, agar terdapat keseragaman dalam penyajian laporan keuangan di seluruh daerah di Indonesia. Ditetapkannya SAP maka telah terpecahkan kebutuhan standar untuk penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan baik pusat maupun daerah dan dengan diberlakukannya SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah akan terwujudnya *Good Government Governance* sehingga bisa mencegah praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam pengelolaan keuangan Negara dan keuangan daerah. Pada tanggal 13 Juni 2004, SAP terbentuk dan dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi merupakan konsekuensi dari

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan PP No 105 Tahun 2000 dan UU No 17 Tahun 2003, yang mengamankan penyajian laporan keuangan pusat dan daerah disusun berdasarkan akuntansi pemerintahan.

Menurut (Kompas : 28/11/2007) pada pemerintah pusat itu sendiri dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum memadai, hal ini bisa terlihat dengan hasil audit dari BPK yang menyatakan bahwa LKPP berstatus *disclaimer*. Panitia Anggaran menilai masalah sumber daya manusia merupakan faktor krusial menyangkut LKPP tahun anggaran 2005. Pemerintah dinilai baru mampu memperbaiki status disclaimer tersebut pada tahun 2009. DPR meminta agar BPK mengaudit ulang LKPP tahun anggaran 2005, DPR menilai audit ulang dilakukan pada pemeriksaan kinerja atas pengelolaan utang pemerintah tahun anggaran 2005 dan 2006 yakni pada pos penganggaran dan pengeluaran penganggaran. Misalnya pelunasan obligasi dalam negeri jangka panjang dibebankan pada mata anggaran yang tidak sebenarnya. Selain itu, penarikan dan penyaluran Surat Utang Nomor 005/MK/199 di lakukan tanpa melalui mekanisme APBN. Pemeriksaan ulang juga harus dilakukan terhadap penyajian saldo utang bunga atas pinjaman luar negeri dalam neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2005 sebesar Rp 21,7 Triliun. Selain itu masih ada nilai piutang pajak tahun anggaran 2005 dan 2006 yang tidak didasarkan pada catatan akuntansi yang memadai dan pengungkapannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Prosedur

pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak juga dinilai tidak sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ditetapkan.

Prinsip utama dalam upaya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengadministrasikan dan menyusun laporan keuangan daerah agar didapatkan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pelaporan baik Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Sumatera Barat dengan ibukota Padang merupakan salah satu propinsi yang sedang berkembang saat ini. Di Padang itu sendiri penerapan SAP baru dilakukan tahun 2007. Dalam penerapan SAP itu sendiri belum sepenuhnya sempurna, dikarenakan sumber daya manusianya belum siap menerima perubahan sistem dalam pencatatan, dimana sebelumnya Pemerintah Kota Padang tidak menerapkan SAP dan kurangnya pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang itu sendiri, sehingga Pemerintah Kota Padang mengalami kendala-kendala dalam proses penerapan SAP tersebut.

Mencermati hal di atas, perlu kiranya mengetahui bagaimana penerapan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis apakah Pemerintah Kota Padang telah menerapkan SAP dengan baik atau tidak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapinya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dalam bentuk skripsi dengan judul :

” Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan Keuangan ”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah :

1. Apakah Pemerintah Kota Padang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ?
2. Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi ?

C. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Peneliti, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar, SE pada Fakultas Ekonomi UNP.
2. Penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah Kota khususnya di Padang.
3. Bagi lembaga terkait sebagai masukan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih dalam lagi mengenai penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (SAP : 2005) sebagai berikut :

” Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. ”

Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

b. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (SAP : 2005) sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

c. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (SAP : 2005) SAP diterapkan di lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan

laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2005 : 247) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut (SAP : 2005) Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Bastian (2005 : 247) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

” Representasi posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas .”

Menurut (SAP : 2005) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

” Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. ’

b. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut Bastian (2005 : 247) adalah :

” Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.”.

Secara khusus tujuan laporan keuangan menurut Bastian (2005 : 247) adalah :

” Menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber – sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya.

5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut (SAP : 2005) adalah :

” Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. ”

Secara spesifik tujuan laporan keuangan Pemerintah menurut (SAP : 2005) adalah :

” Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Menurut (SAP : 2005) Komponen – komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai Realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal, sebab – sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER-BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
64	JUMLAH TRANSFER-BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	XXX	XXX	XX	XXX
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)	XXX	XXX	XXX	XXX
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
97	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
98	PEMBIAYAAN NETO (83 - 97)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
99					
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Tabel 2
Format Neraca

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17)	xxx	xxx
19			
20	INVESTASI JANGKA PANJANG		
21	Investasi Nonpermanen		
22	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
23	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
26	Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 25)	xxx	xxx
27	Investasi Permanen		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
29	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
30	Jumlah Investasi Permanen (28 s/d 29)	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 30)	xxx	xxx
32			
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	xxx	xxx
42			
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46			
47	ASET LAINNYA		
48	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
49	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
51	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
52	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
53	Jumlah Aset Lainnya (48 s/d 52)	xxx	xxx
54			
55	JUMLAH ASET (18+31+41+45+53)	xxxx	xxxx

56			
57	KEWAJIBAN		
58			
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
61	Utang Bunga	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
63	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
64	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 63)	xxx	xxx
65			
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
67	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
68	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
69	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
70	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 69)	xxx	xxx
71	JUMLAH KEWAJIBAN (64+70)	xxx	xxx
72			
73	EKUITAS DANA		
74			
75	EKUITAS DANA LANCAR		
76	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
77	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
78	Cadangan Piutang	xxx	xxx
79	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
81	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (76 s/d 80)	xxx	xxx
82			
83	EKUITAS DANA INVESTASI		
84	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
85	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
87	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
88	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (84 s/d 87)	xxx	xxx
89			
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)	xxx	xxx
93	JUMLAH EKUITAS DANA (81+88+92)	xxx	xxx
94			
95	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (71+93)	xxxx	xxxx

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

Tabel 3
Format Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS			
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0			
Metode Langsung			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX

32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX

64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)	XXX	XXX

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut (SAP : 2005) :

” Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik.

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b) Memiliki Manfaat Prediktif.

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tapi jika hakikat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

e. Laporan Keuangan Konsolidasian

Menurut (SAP : 2005) :

” Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.”

3. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Menurut (SAP : 2005) Pelaporan Keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Undang – undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.

- b. Undang – undang di bidang keuangan negara
- c. Undang – undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
- e. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- f. Ketentuan perundang – undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah.
- g. Peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

4. Asumsi Dasar

Menurut (SAP : 2005) Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari :

- a. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut (SAP : 2005) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara

akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya – pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut (SAP : 2005), setelah semua transaksi – ransaksi yang terjadi pada suatu pemerintah daerah baik transaksi yang berhubungan dengan anggaran maupun dengan neraca dicatat dalam jurnal dan diposting ke akun di buku besarnya masing – masing. Maka dilakukanlah penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari penyusunan laporan realisasi anggaran, penyusunan neraca, penyusunan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran besarnya estimasi pendapatan disajikan pada kolom anggaran, yang merupakan target yang harus dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintahan, sedangkan besarnya realisasi anggaran disajikan pada kolom realisasi yang menunjukkan target yang dicapai pemerintah daerah.

Selanjutnya besarnya apropriasi belanja disajikan pada kolom anggaran yang merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan pemda dan begitu juga apropriasi transfer ke desa disajikan pada kolom anggaran yang merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan, sedangkan besarnya realisasi anggaran belanja dan transfer ke desa disajikan pada kolom realisasi.

Pada anggaran penerimaan pembiayaan, besarnya estimasi penerimaan pembiayaan disajikan pada kolom anggaran, sedangkan besarnya realisasi penerimaan anggaran disajikan pada kolom realisasi. Untuk anggaran pengeluaran pembiayaan, besarnya apropriasi pengeluaran pembiayaan disajikan pada kolom anggaran sedangkan besarnya realisasi pengeluaran pembiayaan disajikan pada kolom realisasi.

b. Neraca

Dalam penyusunan neraca, terlebih dahulu disajikan neraca saldo untuk neraca pemerintah yang diambil dari buku besar masing – masing akun. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Satu transaksi tertentu bisa mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas. Dalam penyusunan laporan arus kas, sebaiknya pemerintah daerah menggunakan metode langsung sesuai dengan yang dianjurkan dalam SAP.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat

Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Penyusunan Catatan atas laporan keuangan sebagai berikut :

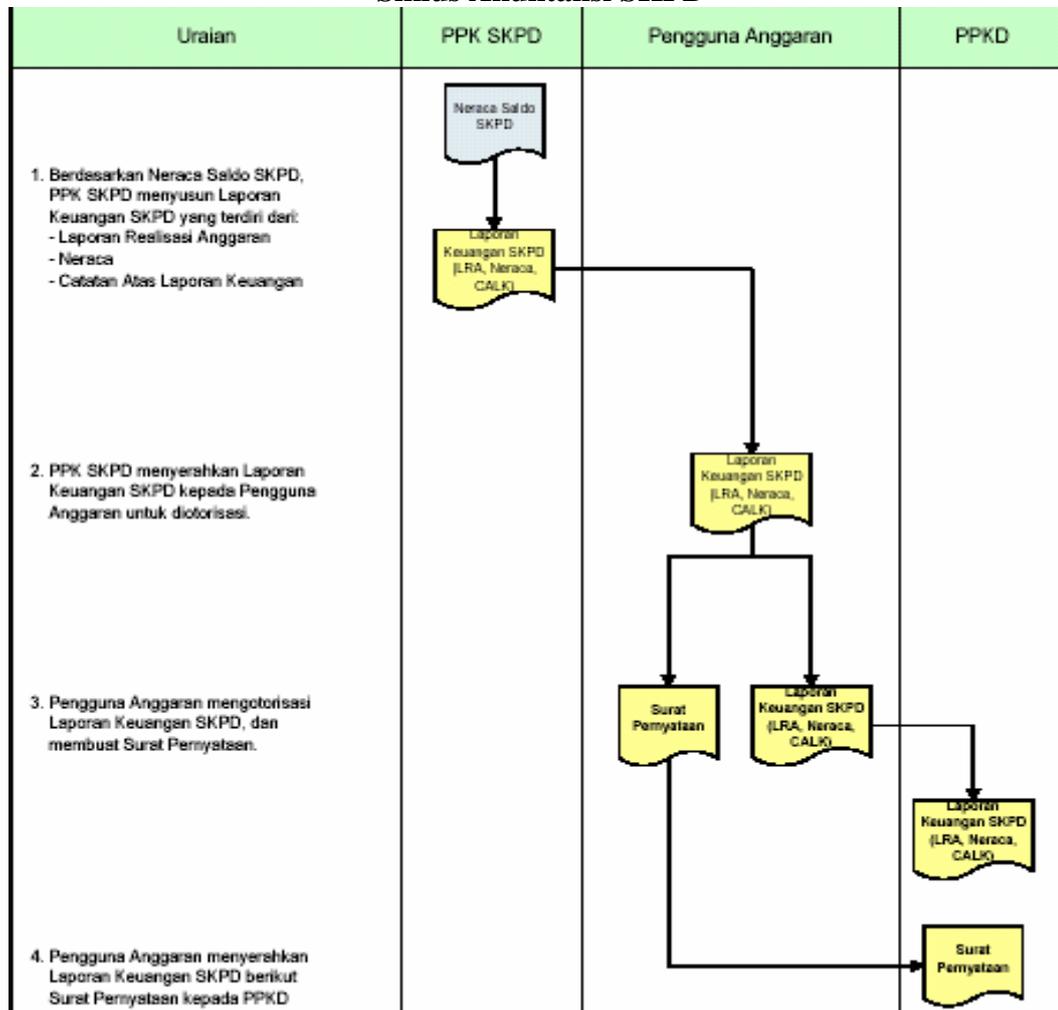
- 1) Kebijakan fiskal/keuangan , ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/APBD,
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3) Kebijakan akuntansi yang penting
- 4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- 5) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
- 6) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah

7. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut (Permendagri : 2006) Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Alur proses siklus akuntansi keuangan daerah terdiri dari:

a. Siklus Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tabel 4
Siklus Akuntansi SKPD

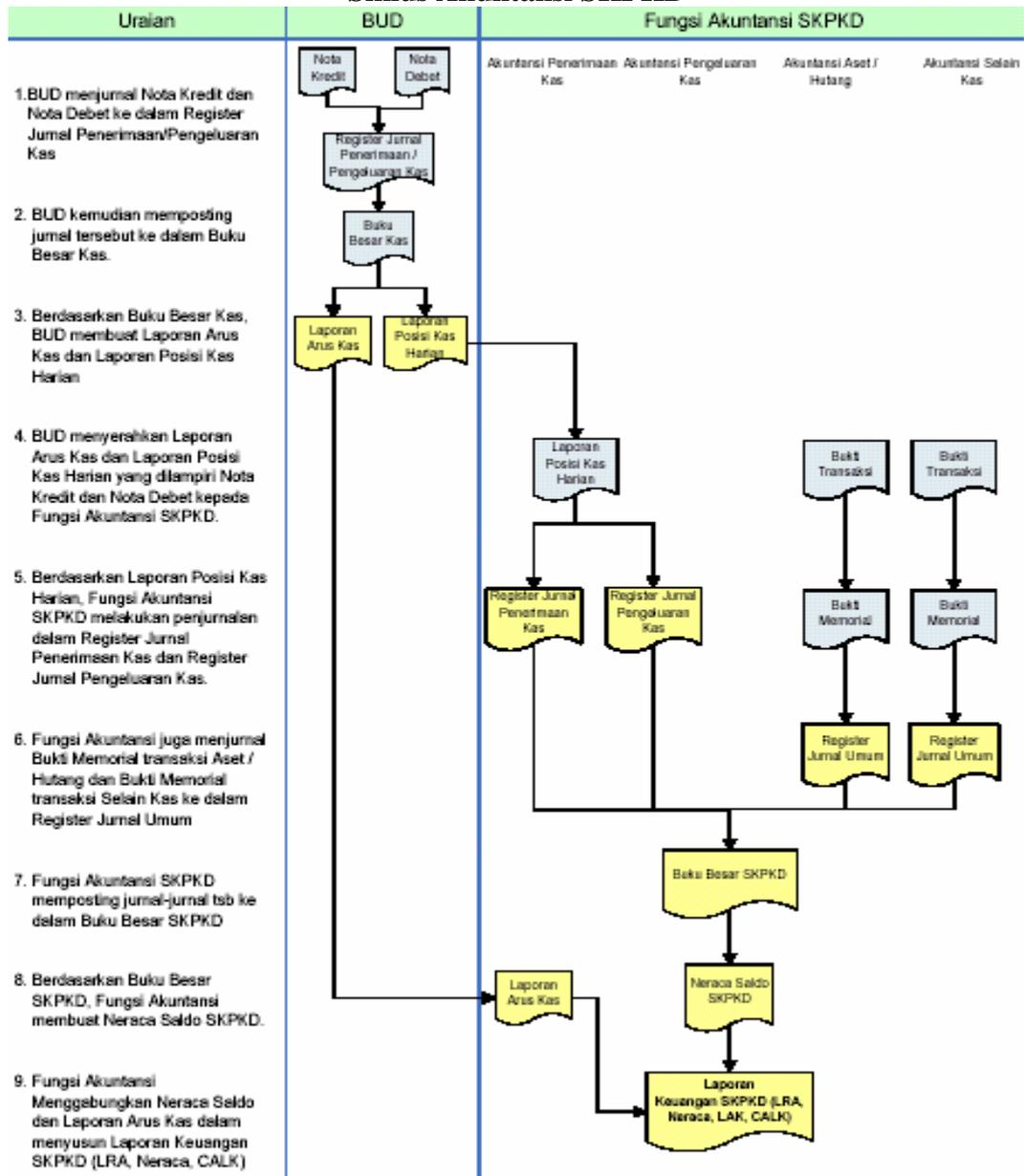


Keterangan :

- SKPD** : Satuan Kerja Perangkat Daerah
LK : Laporan Keuangan
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Siklus Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Tabel 5
Siklus Akuntansi SKPKD

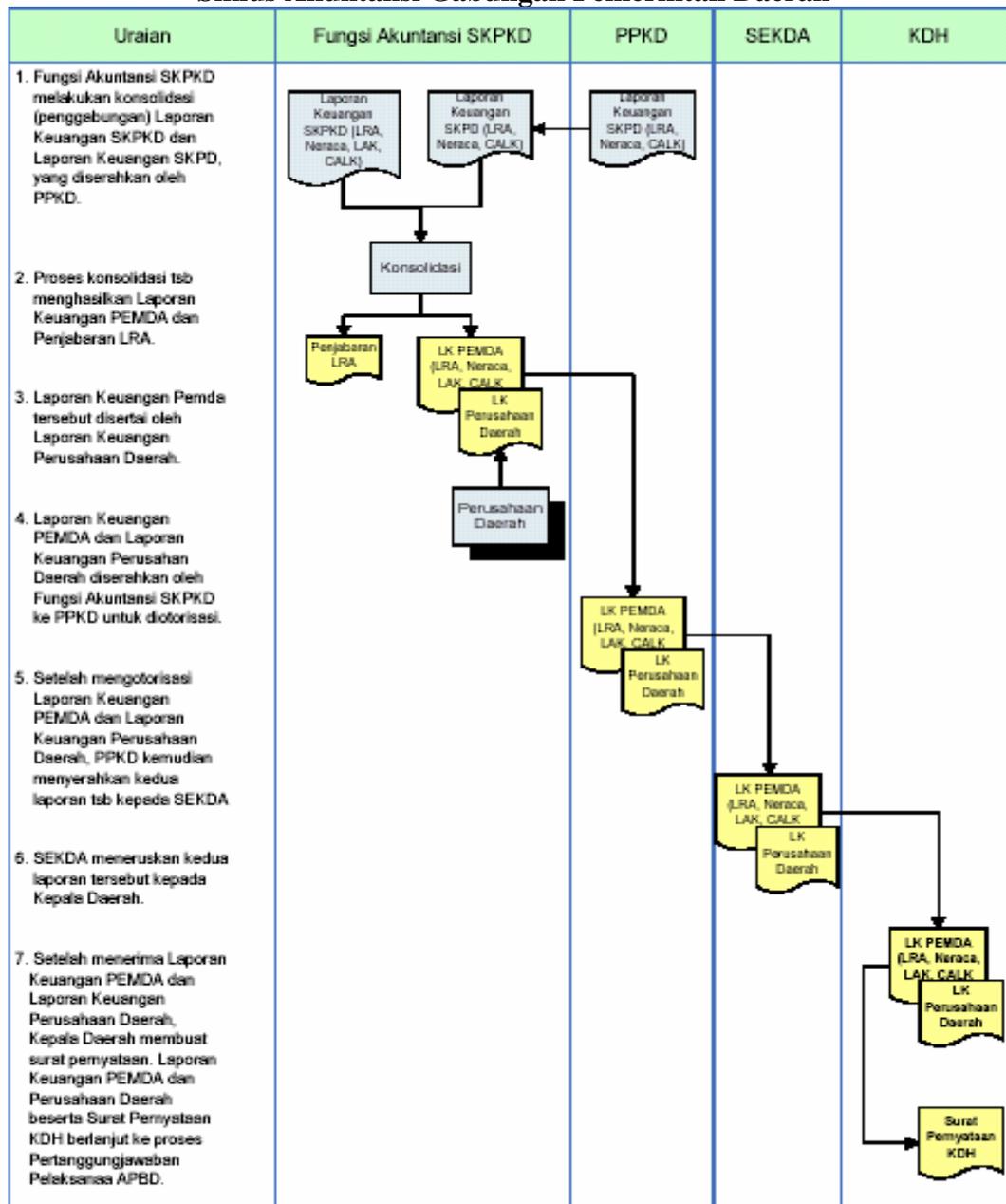


Keterangan :

- SKPD** : Satuan Kerja Perangkat Daerah
LK : Laporan Keuangan
CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
LAK : Laporan Arus Kas
SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

c. Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah

Tabel 6
Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah



Keterangan :

PEMDA : Pemerintah Daerah

SEKDA : Sekretaris Daerah

PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KDH : Kepala Daerah

8. Teori Kendala (The Theory of Constraints) atau TOC

a. Pengertian dan Jenis Kendala

Pada setiap perusahaan secara langsung mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut dengan kendala. Sedangkan menurut Gunadi (2004) :

“ Kendala adalah segala hal dalam perusahaan yang membatasinya untuk mencapai tujuannya “.

Adapun kendala yang timbul dapat terletak pada kapasitas mesin dan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Ketepatan waktu dan kualitas dapat juga menjadi kendala, sehingga seringkali target kurang dapat tercapai. Menurut Hansen dan Mowen (2000:601-602), jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut

1. Berdasarkan Asalnya:

a. Kendala Internal (internal constraint)

Kendala Internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan sumber daya manusia.

b. Kendala eksternal (external constraint)

Kendala Eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok.

2. Berdasarkan Sifatnya

a. Kendala mengikat (binding constraint)

Kendala Mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya

b. Kendala tidak mengikat atau kendur (loose constraint)

Kendala tidak mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Kaplan dan Atkinson (1998) dalam Sulistiowati (2004) menambahkan pengelompokan kendala dalam tiga bagian, yaitu :

1. Kendala Sumberdaya (resource constraints)

Kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.

2. Kendala Pasar (market resource),

Kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan

3. Kendala Keseimbangan (balanced constraints)

Kendala Keseimbangan yang diidentifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi.

b. **Konsep Dasar dalam Teori Kendala**

Teori kendala atau theory of constraints (TOC) merupakan filosofi manajemen sistem yang dikembangkan oleh Eliyahu M Goldratt sejak awal 1980-an. TOC menyatakan bahwa kinerja

perusahaan (sistem) dibatasi constraints. Teori ini mengakui bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya, yang kemudian mengembangkan pendekatan kendala untuk mendukung tujuan, yaitu kemajuan yang terus-menerus suatu perusahaan (continuous improvement). Menurut Blocher, Edward J et.al. (2000:17) teori ini merupakan teknik strategik untuk membantu perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis yang penting. Sedangkan Tersine (1994) dalam Sulistiowati (2004) mendefinisikan TOC sebagai suatu filosofi perbaikan terus-menerus yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan uang saat ini dan dimasa yang akan datang serta untuk menetapkan suatu proses perbaikan terus-menerus. Dengan kata lain, TOC memusatkan perhatian pada kendala-kendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses produksi. Menurut TOC jika hendak meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, maka manajer perlu mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, mengeksploitasinya dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang menemukan cara bagaimana mengatasi kendala tersebut.

c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Menurut SAP :

“Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dari laporan keuangan

yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan.”

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idenya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

9. Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Indra (1999),

“ Sumber Daya Manusia adalah Manusia yang hidupnya bergantung pada dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berkepentingan dan memerlukan sumber dari lingkungan, bahkan berhak diperlakukan seadil – adilnya oleh lingkungan atau penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional.”

Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga kompetitif generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti : *intelligence, creativity dan imagination*, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti otot dan sebagainya.

10. Pengertian Pelatihan

Menurut Bernandian & Russel ;

“ Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. “

Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas – aktivitas yang terencana dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan – kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Pelatihan sering dianggap sebagai aktifitas yang paling dapat dilihat dan paling umum dari semua aktivitas kepegawaian. Para majikan menyokong pelatihan karena melalui pelatihan para pegawai akan menjadi lebih trampil dan karenanya lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika para pegawai sedang dilatih. Para pekerja menyukai pelatihan karena pelatihan membebaskan diri dari pekerjaan mereka atau meningkatkan kecakapan yang bisa digunakan untuk menguasai kedudukan yang sedang mereka duduki atau yang akan mereka duduki. Jadi pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi dimana para pegawai kekurangan kecakapan dan pengetahuan. Pelatihan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kriteria seleksi yang tidak memadai, ketidaktepatan rancangan pekerjaan atau imbalan organisasi yang tidak memadai. Pelatihan lebih sebagai sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota organisasi yang kurang aktif sebelumnya, mengurangi dampak-dampak negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang terbatas atau kurangnya kepercayaan diri dari anggota atau kelompok anggota tertentu.

11. Pengertian Bendahara

a. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Menurut (SAP : 2005)

“ Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.”

Menurut (Permendagri : 2006)

“ Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah, yang selanjutnya disingkat BUD”.

Tugas BUD menurut (Permendagri : 2006) adalah :

- a. menyiapkan anggaran kas
- b. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD)
- c. menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- g. menyimpan uang daerah
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi daerah
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah

- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

b. Bendahara Penerimaan

Menurut (Permendagri : 2006)

“Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”

c. Bendahara Pengeluaran

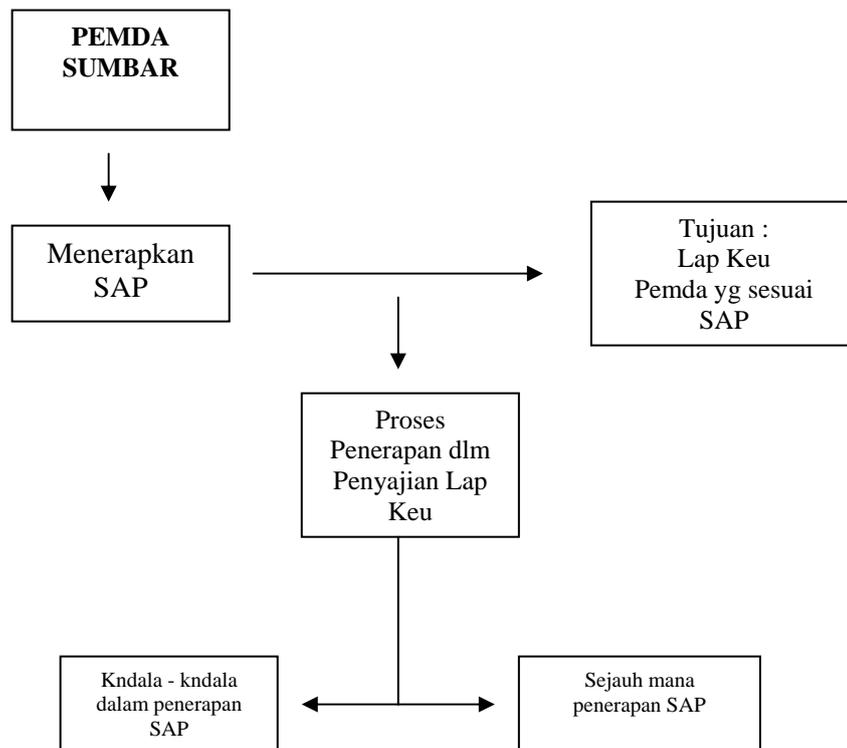
Menurut (Permendagri : 2006)

“ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”.

B. Kerangka Konseptual

Jalur konsep ini adalah melihat proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kota Padang dalam penyajian Laporan Keuangan dan kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penerapan SAP. Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang dibahas, maka kerangka konseptual dalam pembahasan masalah ini adalah prose penerapan SAP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang pada bulan Oktober 2007 dan sosialisasinya pada bulan November. Padahal awal tahun 2007 Pemerintah kota seharusnya wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari tujuh dinas yang diteliti baru ada satu dinas yang tuntas menyelesaikan laporan keuangan yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan, selebihnya baru pada tahap penjurnalan. Untuk laporan arus kas sampai berakhirnya waktu penelitian belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang yaitu pertama Sumber Daya Manusia dibidang keuangan latar belakang pendidikannya banyak yang bukan dari akuntansi, sehingga memiliki kesulitan dalam memahami pencatatan dan siklus akuntansi yang menyebabkan penyusunan Laporan Keuangan tidak tepat waktu, hal ini bisa kita lihat beberapa dinas baru sampai pada jurnal atau neraca. Dinas yang latar belakangnya dari akuntansi hanya terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kendala kedua yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah kota Padang dan hanya memberikan klinik

akuntansi kepada tiap – tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. Kendala ketiga yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sosialisasinya terlalu dekat. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2007, sedangkan disosialisasikan baru pada bulan November tahun 2007, padahal butuh waktu yang cukup lama untuk memahami penyusunan laporan keuangan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan jauh hari sebelum keharusan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga ada tenggang waktu untuk memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, apalagi Sumber Daya manusia latar belakang pendidikannya bukan dari akuntansi
2. Pemerintah Kota Padang lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya dengan cara pertama memberikan beasiswa pendidikan kepada Bagian keuangan khususnya untuk melanjutkan studinya sesuai dengan pekerjaannya. Sumber Daya Manusia harus dibekali pengetahuan akuntansi, baik di tingkat Pimpinan maupun karyawan supaya tidak ada salah komunikasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua Pemerintah Kota Padang, sebaiknya sering memberikan pelatihan-pelatihan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan

mengenai keuangan kepada Dinas-dinas atau kepada SKPD-SKPD. Dan dalam memberikan pelatihan tersebut Pemerintah kota Padang sebaiknya memberikan kesempatan minimal dua orang atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta Erlangga.
- Baswir, Revyson. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : BPFE.
- Hafiz, Abdul. 2007. *Akuntansi Pemerintah Daerah : Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta : SPIA – LAN Pres.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistyowati dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta : BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006.
- Standar *Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Bandung : Fokusmedia.
- Standar *Akuntansi Pemerintahan : Telaah Kritis PP No 24 Tahun*. 2005. Yogyakarta : BPFE
- Yusuf, Amir Abadi. 2003. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.